

ABSTRAK

Khairatul Nafi'ah NIM. 126103212247. **“Implementasi Pemenuhan Alat Bantu bagi Tunanetra pada saat Pencoblosan dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari PKPU No. 12 Tahun 2024 dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”**. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing Bapak Prof. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.

Kata Kunci: *Alat Bantu Pemilu, Disabilitas Tunanetra, PKPU No. 12 Tahun 2024, Fiqih Siyasah, Pemilu Inklusif.*

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Namun, dalam praktiknya, hak politik kelompok disabilitas ini kerap terabaikan, khususnya dalam hal penyediaan alat bantu pencoblosan yang memadai dan setara. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara memenuhi hak-hak konstitusional warga tunanetra dalam proses pemilu.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana pemenuhan tersebut ditinjau dari PKPU No. 12 Tahun 2024? dan (3) Bagaimana pemenuhan tersebut ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyandang tunanetra yang menjadi pemilih, pengurus PERTUNI Tulungagung, serta perwakilan dari KPU Kabupaten Tulungagung. Selain itu, dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan teori Fiqih Siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kabupaten Tulungagung masih belum merata dan bergantung pada inisiatif penyelenggara tingkat bawah. Secara normatif, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PKPU No. 12 Tahun 2024 yang menegaskan hak aksesibilitas pemilih disabilitas. Dalam perspektif Fiqih Siyasah dan Siyasah Dusturiyah, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya prinsip keadilan, persamaan derajat, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak politik seluruh warganya secara utuh dan setara..

ABSTRACT

Khairatul Nafi'ah, NIM. 126103212247. **“The Implementation of Voting Aid Provision for Visually Impaired Persons During Elections: A Review of PKPU No. 12 of 2024 and the Perspective of Fiqh Siyasah (A Case Study in Tulungagung Regency).”** Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Advisor: Prof. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.

Keywords: *Electoral Aid Tools, Visual Disability, PKPU No. 12 of 2024, Fiqh Siyasah, Inclusive Election.*

General elections are a crucial instrument in realizing democracy, where every citizen has the right to participate actively, including persons with visual disabilities. However, in practice, the political rights of this group are often neglected, particularly regarding the provision of adequate and equitable voting aids. This situation raises questions about the extent to which the state fulfills the constitutional rights of blind citizens in the electoral process.

This study aims to answer three main questions: (1) How is the fulfillment of voting aids for visually impaired persons during elections in Tulungagung Regency? (2) How is this fulfillment viewed from the perspective of PKPU No. 12 of 2024? and (3) How is it viewed from the perspective of Fiqh Siyasah?

This research adopts a qualitative approach with a juridical-empirical type of study. Data were collected through in-depth interviews with visually impaired voters, PERTUNI Tulungagung administrators, and representatives from the Tulungagung Regency General Election Commission (KPU). In addition, relevant legal regulations and Fiqh Siyasah theory were analyzed.

The results indicate that the fulfillment of voting aids for the blind in Tulungagung Regency is still uneven and largely depends on the initiatives of lower-level election organizers. Normatively, this condition does not fully comply with the provisions of PKPU No. 12 of 2024, which affirms the accessibility rights of disabled voters. From the perspective of Fiqh Siyasah and Siyasah Dusturiyah, this situation reflects the lack of realization of justice, equality, and the state's responsibility to ensure the political rights of all citizens in a comprehensive and equal manner.